

**INTERPRETASI HUKUM JANGKA WAKTU PENGKREDITAN PAJAK
MASUKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 81 TAHUN 2024**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Magister Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :
Nor Hasan
NIM. 02040424012

**MAGISTER HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nor Hasan

NIM : 02040424012

Prodi : Magister Hukum Tata Negara

Judul Tesis : Interpretasi Hukum Jangka Waktu Pengkreditan Pajak

Masukan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81
Tahun 2024

Dengan sungguh-sungguh memberi pernyataan bahwa TESIS ini seluruhnya adalah hasil riset dan/atau ciptaan Saya sendiri, selain pada poin-poin yang dengan jelas dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 September 2025

Saya yang memberi pernyataan,



Nor Hasan

NIM. 02040424012

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Tesis yang ditulis oleh :

Nama : Nor Hasan
NIM : 02040424012
Prodi : Magister Hukum Tata Negara
Judul : Interpretasi Hukum Jangka Waktu Pengkreditan Pajak
Masukan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
81 Tahun 2024

telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian.

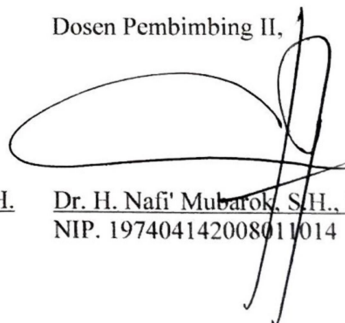
Surabaya, 17 September 2025

Dosen Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
NIP. 196803292000032001

Dosen Pembimbing II,



Dr. H. Nafi' Mubarak, S.H., M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Tesis yang ditulis oleh :

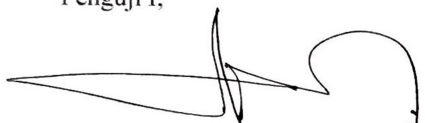
Nama : Nor Hasan

NIM. : 02040424012

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dua dalam program studi Magister Hukum Tata Negara.

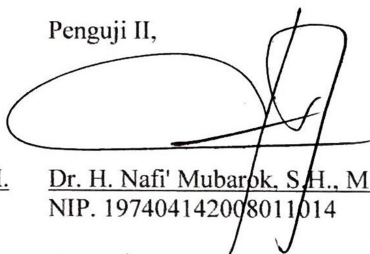
Majelis Sidang Munaqasah Tesis :

Penguji I,



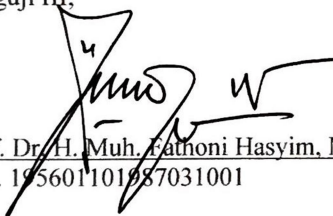
Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji II,



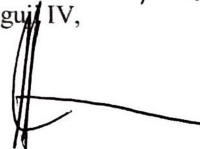
Dr. H. Nafi' Mubarak, S.H., M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III,



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji IV,



Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Surabaya, 29 September 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Soedjan Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nor Hasan
NIM : 02040424012
Prodi : Magister Hukum Tata Negara
E-mail : hajinorhasan23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas
Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-Lain (.....)

yang berjudul : Interpretasi Hukum Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-
Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk
pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan /
mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari Saya selama tetap
mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang
bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah
Saya ini.

Demikian pernyataan ini yang Saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 September 2025



10
METERAI
TEMPEL
03B7EAKX332876525

Nor Hasan
NIM. 02040424012

ABSTRAK

Tesis ini adalah hasil penelitian dengan judul : “Interpretasi Hukum Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024”. Tesis ini ditulis guna menjawab pertanyaan yang dimasukkan dalam 2 (dua) rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana interpretasi atas norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 jika dikaitkan pada aturan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN?; dan 2) Bagaimana penerapan *effective and efficient principles* dalam kebijakan norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis interpretasi atas norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 jika dikaitkan dengan norma Pasal 9 ayat (9) UU PPN serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *effective and efficient principles* dalam kebijakan norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen atau kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga), yaitu teori interpretasi hukum, *effective and efficient principles*, dan *stufenbau theory*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa interpretasi yang dilakukan terhadap norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 jika dikaitkan dengan aturan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN menunjukkan ketidaklengkapan, ketidakjelasan, dan ketidaksesuaian norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 terhadap norma/aturan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan PPN Masukan yang tertera pada Faktur Pajak tidak bisa dikreditkan selain dengan PPN Keluaran pada bulan yang sama saja dengan penerbitan Faktur Pajak tersebut jika berpedoman pada norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pembentukan norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 tidak dilakukan secara efektif dan efisien. Akibatnya, norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 tersebut juga merugikan bagi Wajib Pajak dan memunculkan tambahan *cost* dalam pelaksanaannya.

Penulis merekomendasikan agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Aturan hukum harus dibuat dalam rangka menciptakan aturan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, sebaiknya Menteri Keuangan merevisi PMK 81 Tahun 2024 atau mengusulkan kepada DPR untuk merevisi Pasal 9 ayat (9) UU PPN.

Kata Kunci : Interpretasi, Pajak Masukan, *Effective and Efficient Principles*, *Stufenbau Theory*

ABSTRACT

This thesis is the result of a research study entitled: “Legal Interpretation of the Time Limit for Crediting Input Tax Based on the Minister of Finance Regulation Number 81 of 2024.” This thesis was written to answer two research problems, namely: 1) How is the interpretation of the provision in Article 376 paragraph (1) of PMK 81 of 2024 when linked to Article 9 paragraph (9) of the VAT Law?; and 2) How is the application of the effective and efficient principles in the policy of Article 376 paragraph (1) of PMK 81 of 2024?. The objective of this study is to examine and analyze the interpretation of Article 376 paragraph (1) of PMK 81 of 2024 in relation to Article 9 paragraph (9) of the VAT Law, as well as to assess the implementation of the effective and efficient principles within the policy framework of Article 376 paragraph (1) of PMK 81 of 2024.

This research employs a normative juridical method, using document or library research as the technique for collecting legal materials. Three approaches are applied, namely the conceptual approach, the statute approach, and the historical approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources. The study is grounded in three theories: legal interpretation theory, the effective and efficient principles, and the Stufenbau theory.

The findings of this research conclude that the interpretation of Article 376 paragraph (1) of PMK 81 of 2024, when connected to Article 9 paragraph (9) of the VAT Law, reveals incompleteness, ambiguity, and inconsistency between the two provisions. This inconsistency results in Input VAT listed on tax invoices being creditable only against Output VAT in the same month as the issuance of the invoice, if based on Article 376 paragraph (1) of PMK 81 of 2024. Furthermore, the study also reveals that the formulation of Article 376 paragraph (1) of PMK 81 of 2024 was not carried out in an effective and efficient manner. As a consequence, this provision not only disadvantages taxpayers but also generates additional costs in its implementation.

The author recommends that legislation should always conform to higher legal norms. Legal rules must be drafted to create regulations that are effective and efficient. Therefore, it is advisable that the Minister of Finance revise PMK 81 of 2024 or propose to the House of Representatives (DPR) to amend Article 9 paragraph (9) of the VAT Law.

Keywords: *Interpretation, Input Tax, Effective and Efficient Principles, Stufenbau Theory*

الملخص

تُعد هذه الأطروحة نتاجًا لبحث علمي بعنوان "التفسير القانوني للمدة الزمنية لخصم ضريبة المدخلات استنادًا إلى لائحة وزير المالية رقم 81 لسنة 2024". وقد كُتبت هذه الأطروحة للإجابة عن إشكاليتين رئيسيتين، هما: (1) كيف يتم تفسير حكم المادة 376 الفقرة (1) من لائحة وزير المالية رقم 81 لسنة 2024 عند ربطها بحكم المادة 9 الفقرة (9) من قانون ضريبة القيمة المضافة؟؛ و (2) كيف يتم تطبيق مبدأي الفعالية والكفاءة في السياسة التشريعية للمادة 376 الفقرة (1) من لائحة وزير المالية رقم 81 لسنة 2024؟. يهدف هذا البحث إلى معرفة وتحليل تفسير حكم المادة 376 الفقرة (1) من لائحة وزير المالية رقم 81 لسنة 2024 عند ربطها بالمادة 9 الفقرة (9) من قانون ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إلى معرفة وتحليل تطبيق مبدأي الفعالية والكفاءة في السياسة التشريعية للمادة المذكورة.

وقد أُجري البحث باستخدام المنهج القانوني المعياري، مع الاعتماد على دراسة الوثائق والمراجع (البحث المكتبي) في جمع المواد القانونية. كما استخدم البحث ثلاثة مناهج: المنهج المفاهيمي، المنهج التشريعي، والمنهج التاريخي. واعتمد على ثلاثة أنواع من المصادر القانونية: المصادر الأولية، المصادر الثانوية، والمصادر الثالثية. أما الأطر النظرية التي استند إليها البحث فهي ثلاثة: نظرية التفسير القانوني، مبدأ الفعالية والكفاءة، ونظرية ستوفينباو.

وتوصلت نتائج البحث إلى أن التفسير المطبق على حكم المادة 376 الفقرة (1) من لائحة وزير المالية رقم 81 لسنة 2024 عند ربطها بالمادة 9 الفقرة (9) من قانون ضريبة القيمة المضافة يكشف عن عدم الاكتمال، وعدم الوضوح، وعدم الاتساق بين النصين. وقد أدى هذا التعارض إلى أن ضريبة المدخلات المثبتة في الفاتورة الضريبية لا يمكن خصمها إلا مع ضريبة المخرجات في الشهر نفسه الذي صدرت فيه الفاتورة، إذا ما استُند فقط إلى حكم المادة 376 الفقرة (1) من اللائحة. كما كشف البحث أيضًا أن صياغة المادة 376 الفقرة (1) من لائحة وزير المالية رقم 81 لسنة 2024 لم تُنجز على نحو فعال أو كفاء، مما تسبب في إضرار المكلفين بالضريبة وزيادة التكاليف عند التطبيق.

ويوصي الباحث بضرورة أن تكون التشريعات الصادرة متوافقة مع القواعد القانونية الأعلى مرتبة، وأن تُصاغ القوانين بغرض إرساء قواعد فعالة وكفوءة. وبناءً على ذلك، فمن الأفضل أن يقوم وزير المالية بمراجعة لائحة وزير المالية رقم 81 لسنة 2024، أو أن يقترح على مجلس النواب تعديل المادة 9 الفقرة (9) من قانون ضريبة القيمة المضافة.

الكلمات المفتاحية: التفسير، ضريبة المدخلات، مبدأ الفعالية والكفاءة، نظرية ستوفينباو

DAFTAR ISI

<i>Cover</i>	i
Sampul Dalam	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Persetujuan Dosen Pembimbing.....	iv
Pengesahan	v
Pernyataan Publikasi	vi
Motto Penulisan Tesis	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
المخلص	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Transliterasi.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Kerangka Teoritik	19
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan	32
BAB II INTERPRETASI HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN EFFECTIVE AND EFFICIENT PRINCIPLES DAN STUFENBAU THEORY	33
A. Teori Interpretasi Hukum	33

B. <i>Effective and Efficient Principles</i>	39
C. <i>Stufenbau Theory</i>	43
BAB III INTERPRETASI ATAS NORMA PASAL 376 AYAT (1) PMK 81 TAHUN 2024 JIKA DIKAITKAN DENGAN NORMA PASAL 9 AYAT (9) UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	51
A. Kedudukan Hukum Peraturan Menteri dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	51
B. Interpretasi Norma Pasal 376 Ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 Jika Dikaitkan Dengan Norma Pasal 9 Ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	53
C. Norma Pasal 376 Ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 Tidak Sesuai Dengan Norma Pasal 9 Ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	97
BAB IV PENERAPAN <i>EFFECTIVE AND EFFICIENT PRINCIPLES</i> DALAM KEBIJAKAN NORMA PASAL 376 AYAT (1) PMK 81 TAHUN 2024.....	101
A. Kewenangan Menteri Keuangan dalam Menerbitkan Peraturan Menteri	101
B. Penerapan <i>Effective And Efficient Principles</i> Dalam Kebijakan Norma Pasal 376 Ayat (1) PMK 81 Tahun 2024	104
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
DAFTAR TABEL	129
LAMPIRAN	
PROFIL PENULIS	

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12 Tahun 2011).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2022 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

2. Buku

- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, et al. *Ilmu Perundang-Undangan*. Edited by Anik Iftitah. Serang, Banten: Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Armia, Muhammad Sidiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku Metode Penelitian Sidiq- File Yang Benar.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku_Metode_Penelitian_Sidiq_File_Yang_Benar.pdf).
- Beni Pekei. *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Taushia, 2016.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan kedua. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Edited by Bahtiar. Cetakan I.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Mataram: Sanabil, 2022.
- Gunadi, Titi Muswati Putranti, Neni Susilawati, Adang Hendrawan, Iman Santoso, Wisamodro Jati, Wulandari Kartika Sari, Indriani, and Muhammad Luhur Hambali. *Menguasai Perpajakan Indonesia Seri Pajak Pusat - 1*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2024.
- Hadjon, Philipus M., and Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. 10th ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.
- ccfZAQKelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Third Prin. Massachusetts, Cambridge: Harvard University Press, 1949.
- Khalid. *Ilmu Perundang-Undangan*. Edited by Fatimah and Syafruddin Syam. Cet-1. Medan: CV Mahaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumut, 2014. [http://repository.uinsu.ac.id/8216/1/ILMU PERUNDANG UNDANGAN.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8216/1/ILMU%20PERUNDANG%20UNDANGAN.pdf).
- M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Cet-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cet-I. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2020.
- Mubarak, Nafi', Imam Ibnu Hajar, M. Fathoni Hakim, Holilah, and Sri Wiga. *Kewarganegaraan*. Edited by Wahidah Zein Br. Siregar, Lilik Huriyah, Andriani Samsuri, and Fitriah. Cetakan 1. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukhid, Abd. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Edited by Sri Rizqi Wahyuningrum. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- Nataherwin, Syanti Dewi, and Widyasari. *Kajian Lengkap Tentang PPN Dan PPnBM*. Cetakan Pe. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Purnomo, N., and R. Soerjatno. *PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) Teori Dan Praktek*. Cet-1. Makassar: Nas Media Pustaka PT.Nas Media Indonesia, 2021.
- Septiana, Anis Ribcalia, Suprpto, Monica Feronica Bormasa, Amtai Alalsan, Ahmad Mustanir, Hilarius Wandan, Muhammad Rais Rahmat Razak, et al. *KEBIJAKAN PUBLIK : TEORI, FORMULASI DAN APLIKASI*. Edited by Ari Yanto. Cet-1. Padang Sumatera Barat: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023.
- Shidarta. *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*. Edited by Efran. Cet-I. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2013.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Tutik, Titik Triwulan, and Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Cet.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

ke-3. Jakarta: Kencana (Divisi dari PRENADAMEDIA Group), 2016.

3. Jurnal

A'maludin, Risqi, and Gamalel Rifqi Samhudi. "Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori Dalam Pengaturan Penghinaan Kepada Presiden Di Indonesia (Pengaturan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Kuhp Baru)." *Hukum Responsif* 15, no. 2 (2024): 9–16.
<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/view/8919>.

Afdalis, A. "Pendelegasian Peraturan Dari Undang-Undang Kepada Peraturan Menteri Secara Langsung Dalam Kerangka Sistem Presidensial." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 1 (2020): 60–86.
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.636>.

Ahmad Wahyudi Zein, Muhammad Riski, Allya Zahra Putri Nasution. "Efisiensi Penggunaan Anggaran Publik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 2, no. 2 (2025): 109–18.

Akhadi, Iman. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Di Indonesia." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 3, no. 2 (2023): 461–70.
<https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2120>.

Alif Hidayat, Ahmad, and Ikhsan Fatah Yasin. "Mengurai Persoalan Hyper Regulation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dengan Formulasi Diet Regulasi." *Justitiable (e-ISSN: 2662 1047)* 7, no. No. 2 (2025): 106–20.

Amalia, Rizka. "Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pedoman Kualitas Hukum Yang Baik." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2024): hlm 6-7.

Ananda, Ega. "Teknik Pembuatan Perundang-Undangan : Prinsip , Metode , Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 2 (2025): 76–82.

Angeline, Chyntia, and R Arja. "Analisis Variasi Keputusan Banding Mengenai Sengketa Faktur Pajak Pertambahan Nilai Periode 2009-2013." *Tax &Accounting Review* 4, no. 1 (2014).
<http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3092%0Ahttp://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/viewFile/3092/2784>.

Anindyajati, Titis, Winda Wijayanti, and Intan Permata Putri. "Implementation and Legal Consequences of the Application of the Lex Specialist Legi Generalist Principle on the Privileges of Aceh." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 654–76.
<https://doi.org/10.31078/jk1838>.

Annata Nurhan, Cinta, Rizky Sri Hapsari, Rr Luh Sekar Nur Sukmawati, Ahmad Fadhil Haidar, Roderick Natanael, and Muhammad Pradana

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Putra. "Relevansi Fungsi Penafsiran Gramatikal Dalam Memahami Hukum." *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 5624, no. 9 (2024): 273–78. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>.
- Anta Kusuma, I Gede Komang Chahya Bayu. "Menakar Kualitas Pemeriksaan Pajak Dalam Sengketa Pajak." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 2, no. 1 (2019): 77–84. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.545>.
- Apendi, Sofyan. "Ketidadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional." *PALAR (Pakuan Law Review)* 07, no. 01 (2021): 111–26. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.
- Arifin. "Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 3 (2015): 6.
- Askarial. "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum." *Menara Ilmu* XII, no. 2 (2018): 79.
- Aulia Anastasya Putri Permana, and Shafarina Intan Khomsah. "Penafsiran Restriktif Atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021): 25–36. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4603>.
- Barnard, Chester I. *The Functions of the Executive*. First Publ. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1938.
- Basir, Abdul, and Adi Barata. "Can Input Tax of That Discovered on The Audit Process Be Treated as Value Added Tax (VAT) Credit? A Legal Perspective Analysis" 140, no. Ic leh (2020): 1–6. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.001>.
- Batubara, Rajali. "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 71–92. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bower, Peter, and Simon Gilbody. "Stepped Care in Psychological Therapies: Access, Effectiveness and Efficiency. Narrative Literature Review." *British Journal of Psychiatry* 186, no. JAN. (2005): 11–17. <https://doi.org/10.1192/bjp.186.1.11>.
- Cecep Cahya Supena. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–35. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>.
- Chandra, M. J. A, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, and Ade Kosasih. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- Yang Sistematis , Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 147 (2022): 5. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/790>.
- Chen, Loo Ern, and Mohd Shukry Bin Md Taib. “Goods and Services Tax (GST): Challenges Faced by Business Operators in Malaysia.” *SHS Web of Conferences* 36 (2017): 00027. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173600027>.
- Christianto, Hwian. “Batasan Dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Pamator* 3, no. 2 (2010): 101–13.
- Crawford, Paul, and Paul Bryce. “Project Monitoring and Evaluation: A Method for Enhancing the Efficiency and Effectiveness of Aid Project Implementation.” *International Journal of Project Management* 21, no. 5 (2003): 363–73. [https://doi.org/10.1016/S0263-7863\(02\)00060-1](https://doi.org/10.1016/S0263-7863(02)00060-1).
- Deffains, Bruno, and Giuseppe Dari-Mattiacci. “Uncertainty of Law and the Legal Process.” *Journal of Institutional and Theoretical Economics* 163, no. 4 (2007): 627–56. <https://doi.org/10.1628/093245607783242990>.
- Disemadi, Hari Sutra. “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum (Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies).” *Journal of Judicia; Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v.>
- Edyson, David, Wincent Hungstan Angkasa, and Rasji Rasji. “Dinamika Hubungan Lembaga Eksekutif Dan Legislatif Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia.” *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 668–75. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5900>.
- ELVIANDRI, E. “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 252. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>.
- Fadhli, Harun, Sarip, Rohadi, and Nur Rahman. “Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Presidential Threshold Dan Regent Treshold.” *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 5, no. 2 (2021): 46–69.
- Firma, Aditya Zaka, and Winata M. Reza. “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 120.
- Ginting, Br. Sryani. “Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok.” *Jurnal Law Pro Justitia II*, no. 2 (2017): 65. <https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwJXVGsQQRGxmtCLPGGbZJvfbKj?projector=1&messagePartId=0.1>.

- Grimshaw, J. M., R. E. Thomas, G. MacLennan, C. Fraser, C. R. Ramsay, L. Vale, P. Whitty, et al. "Effectiveness and Efficiency of Guideline Dissemination and Implementation Strategies." *Health Technology Assessment* 8, no. 6 (2004). <https://doi.org/10.3310/hta8060>.
- H, Rajashekar, and Manoj V D. "Mechanism Of Input Tax Credit Under GST– An Overview." *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)* 10, no. 9 (2022): 678–81. <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2209332.pdf>.
- Hadi, Syofyan. "The Influence of Theorie Von Stufenbau Der Rechtsordnung in the Indonesian Legal System." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 20 (2024): 202–10. <https://doi.org/10.30996/dih.v20i2.10989>.
- Hadji, Kuswan, Fulvian Dzaki Zada, Salsabila Nurvan Aayusha, Achmad Rizky Airlangga, and Nadia Manihuruk. "Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum Dan Kerwarganegaraan* 8, no. 6 (2024): 4–10.
- Hakkam, Sadewa, and Srihadi Winarningsih. "Analisis Efektivitas Penerapan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Alternatif Percepatan Restitusi Pajak Pada Klien SAR Tax & Management Consultant." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (2024): 1173–86. <https://doi.org/10.54082/jupin.482>.
- Haniyah, Rizqi, and Asqolani Asqolani. "Penghitungan Kredit Pajak Masukan Pkp Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang PPN Dan Yang Dibebaskan (Studi Pada Pdam Tirta Patriot)." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 3, no. 2 (2020): 60–69. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.667>.
- Harahap, Diah Ratu Sari. "Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Dalam Pengaturan Penanganan Fakir Miskin." In *Seminar Nasional P4M UNAS*, 91–98, 2018.
- Haris, Oheo K. "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan." *Yuridika* 30, no. 1 (2017): 58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4879>.
- Hariyani, Desi Dwi. "PIDANA NARKOTIKA Desi Dwi Hariyani S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret." *Dinamika* 8, no. 1 (2020): 23–35.
- Hasanah, Noor, Rr. Fitri Diah Anggraeni, Indra Pahala, and Puji Wahono. "Analisis Sengketa Pajak Di Indonesia: Perspektif Konsultan Dan Fiskus." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2025): 1342–49. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.7040>.
- Hasibuan, H.A. Lawali, and Alvin Hamzah Nst. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* 15 (2023): 136–45.
- Hasibuan, Himliah. "Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung."

- YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 76–84. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>.
- Herman, Herman, and Firman Muin. “Sistematikasi Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (2018): 89. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15445>.
- Hidayah, Vidya. “Penafsiran Hukum Dan Konstitusi Menggunakan Metode Historis Dalam Menguji Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 5 (2023): 38–45.
- Huda, Ni'matul. “Kedudukan Peraturan Menteri Dan Kelembagaan Pengawasan Perundang-Undangan.” *Jurnal Hukum Kenegaraan* 1, no. 1 (2023): 1–17. <https://journal.aphtnhan-jatim.org/index.php/JHK/article/view/4/4>.
- Idris, Tarwin. “Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 607–25. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art7>.
- IKPI. “Negara Tanpa Pajak Penghasilan: Destinasi Menarik Bagi Ekspatriat,” n.d. <https://ikpi.or.id/en/negara-tanpa-pajak-penghasilan-destinasi-menarik-bagi-ekspatriat/>.
- Irfan Ardyan Nusanto. “Analisis Terhadap Dualitas Peraturan Menteri Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (2021): 39–52. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v4i1.4660>.
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.
- Isroji, Isroji, Khoirul Anam, Andrie Irawan, Moh Shofiyul Huda MF, Ahmad Syafii Rahman, and Fadzlurrahman Fadzlurrahman. “Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2024): 45–56. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226>.
- Jeong, Ki-Young, and Don T. Phillips. “Operational Efficiency And Effectiveness Measurement.” *International Journal of Operations & Production Management* 21, no. 11 (2001): 1404–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/EUM00000000006223>.
- Juanda, Enju. “Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 168. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>.
- Junaidi, Wulan Novianti. “Penafsiran Hukum Futuristik Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023.” *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 02 (2024): 301–20.

- <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9255>.
- Kasim, Elsie Sylviana Kasim, and Qanitha Mayra Salsabila. "Evaluasi Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak Belum Berproduksi pasca Omnibus Law Studi Kasus PT Z." *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.7454/jabt.v4i2.1032>.
- Kasim, Elsie Sylviana, and Muhammad Kemal Pasha. "Koreksi Pajak Masukan Atas Jawaban Konfirmasi 'Tidak Ada' (Studi Kasus PT. X)." *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.7454/jabt.v3i2.1017>.
- Keh, Hean Tat, Singfat Chu, and Jiye Xu. "Efficiency, Effectiveness and Productivity of Marketing in Services." *European Journal of Operational Research* 170, no. 1 (2006): 265–76. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.050>.
- Kusumastuti, Hadining, and Dinda Alisya Putri. "Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Terutang Dan Dibebaskan Dari Pajak Pertambahan Nilai." *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.7454/jabt.v1i1.26>.
- Kusumastuti, Hadining, and Era Novia Putri. "Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Atas Faktur Pajak Masukan Manual." *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.7454/jabt.v1i2.40>.
- Kusyenia, Rd., Ryan Nugraha, and Sudarwanto. "Implementasi Prepopulated Pajak Masukan Dan SPT Masa PPN Pada Aplikasi Efaktur 3.0." *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 8, no. 2 (2021): 172–82. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1919/898>.
- Latuny, Jhon Alberth, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu. "Interpretasi Hukum Mutatis Mutandis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (2024): 100. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2078>.
- Lubis, Elfahmi, and Romadhona Kusuma Yudha. "Omnibus Law Sebagai Pembaharuan Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2021): 144–59.
- Luthan, S. "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum [Legal and Moral Dialectic in Legal Philosophy Perspective]." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 (2012): 506–23. <https://media.neliti.com/media/publications/84461-none-1a1b134d.pdf>.
- M. Manullang, E. Fernando. "Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis." *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 262–85. <https://doi.org/10.25123/vej.3495>.
- Mansor, Nor Hafizah Abdul, and Azleen Illias. "Goods and Services Tax <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- (GST): A New Tax Reform in Malaysia.” *International Journal of Economics Business and Management Studies - IJEBMS* 2, no. 1 (2013): 12–19. <https://ideas.repec.org/a/onl/ijebms/v2y2013i1p12-19id296.html>.
- Manullang, E. Fernando M. “Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis Dalam Perspektif Fondasionalisme.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 284. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584>.
- Marzuki, Romlih. “Analisis Implementasi Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan Dalam Masa Pajak Tidak Sama.” *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6, no. 1 (2022): 17–37. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1407>.
- McNally, Jeffrey J. “The Functions of the Executive [Review of the Book by C. Barnard].” *Academy of Management Learning and Education*, The 17, no. January 2018 (2018): 1–3.
- Meutia, Intan Fitri. *Reformasi Administrasi Publik*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2017.
- Mihaiu, Diana Marieta, Alin Opreana, and Marian Pompiliu Cristescu. “Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector.” *Romanian Journal of Economic Forecasting* 13, no. 4 (2010): 132–47.
- Mittenzwei, Klaus, David S. Bullock, and Klaus Salhofer. “Towards a Theory of Policy Timing.” *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics* 56, no. 4 (2012): 583–96. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8489.2012.00601.x>.
- Monita, Dynda Hesta, and Rusnandari Retno Cahyani. “Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK) Dalam Pengawasan Wajib Pajak.” *Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* VII, no. 2 (2018): 72–90.
- Monoarfa, Heryanto. “Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan.” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 1–9.
- Mubarok, Nafi. “Sistem Pemerintahan Di Negara-Negara Rumpun Melayu.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, no. 1 (2021): 126–55. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.66>.
- Muhtadi, Muhtadi. “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>.
- Muwahid. “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim.” *Al-Hukama’* 7, no. 1 (2017): 224–48. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.224-248>.
- Naiborhu, Mesa Indra, and Wagiman Wagiman. “The Fundamental Position Of Lex Posterior Derogat Legi Priori in the Conflict of Norms Against the Rights of Holders of The Right to Justice.” *Jurnal*

- Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 2 (2024): 659–71. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i2.906>.
- Nail, Muhammad Hoiru. “Kedudukan Lembaga Negara (Utama & Pembantu) Terhadap Konsep Trias Politica Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Focus Journal Law Review* 1, no. 1 (2016): 1–23.
- Najar, Boushra W. “Efficiency and/or Effectiveness in Managing Organizations.” *Journal of Education and Culture Studies* 4, no. 2 (2020): p131. <https://doi.org/10.22158/jecs.v4n2p131>.
- Nariswari, Anindya, Sarah Selli Ardelia, Puji Wahono, and Indra Pahala. “Manajemen Perpajakan: Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia (Kajian Literatur).” *Jurnal EMT KITA* 8, no. 3 (2024): 854–63. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2607>.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Ase Pustaka*. Vol. 2. Sukoharjo: Oase Pustaka Oase Group, 2020. [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).
- Nurdiansyah, Dian Hakip, Ahmad Nawawi, Kosasih Kosasih, and Siti Jamilah Sundamanik. “ANALYSIS OF E-INVOICE IMPLEMENTATION IN INPUT TAX CONTROL.” *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 15, no. 1 (2021): 118–25. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v15i1.169>.
- Pratama, Juwita Putri, Lita Tyesta ALW, and Sekar Anggun Gading Pinilih. “The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations in the Hierarchy of Legislative Regulations.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 886–908. <https://doi.org/10.31078/jk1946>.
- Pratama, Yogi, Muhammad Irsyad Tirtasah, Yarni Nikita Ahmady, and Ardoyo Wardhana. “Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Keputusan Yang Dimohonkan Kepada Pejabat Tata Usaha Negara.” *Perspektif Hukum* 19, no. 1 (2019): 167. <https://doi.org/10.30649/phj.v19i1.197>.
- Prayitno, Suko. “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 08, no. 02 (2017): 19–36.
- Prianto, Wahyu. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19. <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>.
- Priya, MS. “A Study On Input Tax Credit (Itc) Under GST.” *International Journal for Research Trends and Innovation* 7, no. 8 (2022): 848–52.

- Rachmawati, Agung Retno, and Joko Nur Sariono. "Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Ditetapkan Oleh Fiskus Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak." *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 196. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.83>.
- Rachmawati Nur Ariyanti, Evie. "Akibat Hukum Pengkreditan Pajak Masukan Dengan Pajak Keluaran Dalam Masa Pajak Yang Tidak Sama." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1064>.
- Rahmadhony, Aditya, Iwan Setiawan, and Mario Ekoriano. "Problematisa 'Delegated Legislation' Pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 17, no. 04 (2020): 407–22.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025>
<http://dx.doi.org/10.1038/nature10402>
<http://dx.doi.org/10.1038/nature21059>
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
<http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- Rahman, Abdul. "Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak: Upaya Legal Dalam Kerangka Sistem Administrasi Perpajakan." *Jurnal Ilmu Administrasi* VII, no. 1 (2010): 1–6.
- Rasyid, Rafi'i Habib Al. "Biaya Kepatuhan Pajak: Sudut Pandang Asimetris Informasi." *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* 5 (2023): 298–304.
<https://doi.org/10.20885/ncf.vol5.art34>.
- Riana, Rati, and Muhammad Junaidi. "The Use Of Indonesian Formal Language In The Process Of Legislative Drafting in Accordance With Law Number 12 Of 2011." *Hang Tuah Law Journal* 2, no. 1 (2018): 63–75.
- Ridwan. "Eksistensi Dan Urgensi Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial The Existence and Urgency of Ministry." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 829–45.
- Riswati, F., Putri, A. T., & Tjahjono, H. "Analisis Perhitungan Pajak Masukan, Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Rolas Nusantara Mandiri Surabaya. ." *Income* 3, no. 1 (2022): 1–9.
- Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46.
<https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Rusdiono, Leander Resadhatu, and Ning Rahayu. "Analysis of Cascading Effect on Different Tax Period Invoice Crediting Policy." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 4, no. 8 (2024): 7228–42.
<https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i8.1731>.

- Sadmididi, Edra. "Jurnal Supremasi Hukum." *Jurnal Supremasi Hukum* 24, no. 2 (2015): 191–200. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/2211>.
- Saha, Gopal Chandra, Akber, Aditi Roy, Kazi Latifur Reza, Suma Akther, Sumaiya Afrin, and Mohammad Anisur Rahman. "Impact of the Combination of Managerial Efficiency and Effectiveness on an Organization." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 6 (2024): e3633. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i6.3633>.
- Saniamarani, Kadek Sandra Putri, and Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Kekosongan Norma Hukum Dalam Pemenuhan Hak Korban Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya*, 12, no. 07 (2024): 1607–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p19>.
- Sellang, Kamaruddin. *Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ombak Tiga, 2016. www.penerbitombak.com.
- Siddiqui, Sulaman Hafeez, and Waheed Asghar. "Linking Training, Productivity and Competitive Strategy: Implications of Value Chain Model for Strategically Effective Training Programs." *International Review of Business Research Papers* 4, no. 1 (2008): 310–24.
- Sidik, Morni Hayati Jaafar, Nur Jannah Muhaidin, and Masniza Supar. "Goods and Services Tax and Sales and Services Tax in Malaysia: A Review of Literature." *International Journal of Financial Research* 10, no. 5 (2019): 208–14. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p208>.
- Siregar, Khaista Muftiha, and Muhammad Taufiq Budiarto. "Barang Kebutuhan Pokok Dan Jasa-Jasa Tertentu Menjadi Barang Dan Jasa Kena Pajak Di Dalam UU HPP: Meninjau Penyebab Dan Dampak." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6, no. 2 (2022): 397–409. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1855>.
- Siti Atikah, Iis. "Yurisprudensi Sebagai Upaya Koreksi Terhadap Kekosongan Dan Kelemahan Undang-Undang." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 61–69. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1676>.
- Sitorus, Eduward Tony, Ardiansyah, Maralus Samosir, and Ringkot P Nainggolan. "Analisis Yuridis Pengujian Kebenaran Materil Atas Ketentuan Formil Pada Sengeketa Pajak Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor 009988.16/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023." *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 06, no. 02 (2025): 72–85.
- Slamet, Kusnu Goesniadhie. "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum* 11, no. 27 (2004): 82–96.
- Sofwan, Haeruman, and Rusnan. "Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa

- Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (2021): 31–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.30>.
- Sony, Besty Ardelia. "Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Klinik ABC Di Surabaya." *Analisis Implementasi Pendidikan Kewirausahaan* 3, no. 1 (2020): 1–14.
- Sonya Azharani Nugrahani, and Muslimin. "Evaluasi Atas SP2DK Pada Pengusaha Kena Pajak." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 12 (2024): 4599–4614. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i12.4551>.
- Sukardi, and E. Prajwalita Widiati. "Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya." *Yuridika* 27, no. 2 (2012): 141–56.
- Sulastyawati, Dwi. "Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* 7, no. 10 (2014): 119–28.
- Supriadi, Didi Adi, Nurma Risa, Mundianah, and Syahfebriano Bogar. "The Implementation of Prepopulated Value Added Tax-In on E-Invoice 3.0 at Crediting of Value Added Tax-In at PT. XYZ." *Basic and Applied Accounting Research Journal* 2, no. 1 (2022): 26–34. <https://doi.org/10.11594/baarj.02.01.05>.
- Sutiawati, Sutiawati. "Application of the Principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali in Cases of Domestic Violence with Unofficial Marriage Status." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2023): 64–77. <https://doi.org/10.56087/aijih.v26i2.465>.
- Sutiyoso, Bambang. "Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Maknanya Bagi Para Pihak Yang Bersangkutan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 207–33. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art3>.
- Syamsuddin, M. Aziz. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Edited by Soewisnu. Cet-1, Ed-. Jakarta: SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 2021. <https://emedia.dpr.go.id/ebook/wp-content/uploads/2024/02/PROSES-TEKNIK-PENYUSUNAN-UNDANG-UNDANG.pdf>.
- Taurisa, Devi. "Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema Terhadap Kepastian Hukum Bagi Iklim Usaha." *University Of Bengkulu Law Journal* 5, no. 2 (2020): 89–105. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.89-105>.
- Ubaiyana, and Mar'atun Fitriah. "Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Uu 12/2011." *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (2021): 599–623. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.2322>.

United Nations Economic And Social Commission For Asia And The

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Pacific. "What Is Good Governance?," 1997. <https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>.
- Vijayantera, I Wayan Agus. "Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 3 (2020): 22–28.
- WAHYUNINGSIH, NINING. "Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 1 (2014): 1–11.
- Wijaya, Suparna, and Nurul Isyatulfarda. "Vatcredit Oninventory Acquisition When Taxable Entrepreneurshave Not Producedin the Business Sector of Apartments in Indonesia." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 12, no. 2 (2020): 2407–17. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I2/S20201288>.
- Wijaya, Suparna, and Dewani Izma Awwalia Sabina. "Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 5, no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1241>.
- Wilson, Magnus, Krzysztof Wnuk, Johan Silvander, and Tony Gorschek. *A Literature Review on the Effectiveness and Efficiency of Business Modeling. E-Informatica Software Engineering Journal*. Vol. 12, 2018. <https://doi.org/10.5277/e-Inf180111>.
- Yohana, Richa, Dahlianatalia Lumban Gaol, Ardawani Hutasoit, Tasya br Marbun, and Tiur Malasari. "Pajak Pendapatan Negara Dan Kesejahteraan Masyarakat Pendekatan Perilaku Ekonomi State Income Tax and Community Welfare Economic Behaviorial Approach." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 31646–52. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/12167%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/12167/9370>.
- Yulisfan. "Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Dana Dalam Menganalisis Laporan Keuangan Publik." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu* 1, no. 2 (2023): 107–12. <https://doi.org/10.47709/jpmasdi.v1i2.3174>.
- Zega, Ariani, Yudi Kornelis, and Diki Zukriadi. "Pertanggung Jawaban Hukum Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Terkait Pengeluaran Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 2118–7453.

4. Website

- IKPI. "Negara Tanpa Pajak Penghasilan: Destinasi Menarik Bagi Ekspatriat," n.d. <https://ikpi.or.id/en/negara-tanpa-pajak-penghasilan-destinasi-menarik-bagi-ekspatriat/>. (diakses 18 Juli 2025)

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penerimaan Negara Dari Pajak Dan Jumlah Penerimaan Negara (Dalam Triliun Rupiah)
Tabel 2	Perbandingan Pasal Pengkreditan Pajak Masukan
Tabel 3	Hubungan Efektivitas (<i>Effectiveness</i>) dan Efisiensi (<i>Efficiency</i>)
Tabel 4	Histori Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Tabel 5	Perbedaan Norma Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 1994 dan Tahun 2000
Tabel 6	Perbedaan Norma Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000 dan Tahun 2020
Tabel 7	Syarat Pajak Masukan Dapat Dikreditkan
Tabel 8	Syarat Pajak Masukan Dapat Dikreditkan
Tabel 9	Perbandingan Unsur-Unsur Pembentuk Norma Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024
Tabel 10	Faktur Pajak
Tabel 11	Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
Tabel 12	Persamaan dan Perbedaan Faktur Pajak dengan Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
Tabel 13	Historis Pengaturan Pengkreditan Pajak Masukan
Tabel 14	Persandingan Pasal Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan